

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. *Kinerja*, 2: 209-210.
- Agnika, Mutia, Sugih Sutrisno Putra & Sudrajat. 2021. Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3: 493-503.
- Bahri, Syaiful (Eds). 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Boedi, Soelistijono. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread*, 2: 183-190.
- Drucker, P.F. 1999. *Manajemen: Tugas, Tanggung Jawab dan Praktek*. Jakarta: Gramedia.
- Fahrianta, Riswan Yudhi & Viani Carolina. 2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1: 57-72.
- Haryanto, Sahmuddin & Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifa, Lia. 2021. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 4: 640-651.
- Hansen & Mowen. 2004. *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riadi, Muchlisin. Kajianpustaka.com. 2021. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) - Pengertian, Fungsi, Struktur dan Penyusunan,(online), (<https://www.kajianpustaka.com/2021/12/apbd-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html>), diakses 15 Desember 2022).
- Karlina, Anis & Nur Handayani. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3: 911-924.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Meningkatkan Kualitas Belanja Indonesia, (online), (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html>), diakses 30 September 2022).
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2022. Penyerapan Belanja Daerah Lebih Buruk, (online), (<https://www.kppod.org/berita/view?id=344>), diakses 2 Oktober 2022).
- Labi, A. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5 (1), 1355–1370
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Mahsun, Moh. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Majid, Jamaluddin. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almada.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghali Indonesia.
- Palilingan, Anastasia Friska, Harijanto Sobijoni & Lidia Mawikere. 2015. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1:17-25.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Susetyo, Didik. 2008. Kinerja APBD Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1: 39-53.
- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 3 : 74-81.
- Sagay, Brian, 2013. *Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan*

Yuwono, S.I.T, Agus. dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publishing. Malang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis**BIODATA****IDENTITAS DIRI**

Nama : Fidyawati Djapri
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 02 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. Tamangapa Raya No. 96 B
Telepon Rumah dan HP : 081803660782
Alamat *e-mail* : Fidyawatiwati7@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN**Pendidikan Formal**

- Tahun 2007-2013 : SD Inpres Antang II
- Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 19 Makassar
- Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 13 Makassar

Pendidikan Non-formal

- **Tahun 2019** : Pelatihan Basic Learning Skills, Character and Creativity (BALANCE) Universitas Hasanuddin.

Dengan biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Makassar, 30 Januari 2023

Fidyawati Djapri

Lampiran 2. Peta Teori

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dara Gendis Wiranda (2021)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Periode 2016-2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja - Anggaran Belanja 	Dilihat dari varians belanjanya kinerja keuangan sudah dapat dikatakan baik. Sedangkan kinerja anggaran belanjanya dilihat dari rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang negatif.
2	Wahyuniar (2017)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai.	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja - APBD 	penelitian yang serupa dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan hasil kinerja anggaran pendapatannya secara keseluruhan dapat dikatakan baik egitu juga dengan kinerja keuangna belanja daerahnya.
3	Elizar Sinambela, Kiki Rizki Ana Pohan (2016)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja - APBD 	Dalam kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan baik, meskipun belum terlampaui target dalam anggarannya. Dari sisi Komponen Pendapatan Daerah, dari Pendapatan Asli

				Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikatakan baik.
4	Sakina Nusarifa Tantri dan Putri Irmawati (2018)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja - Anggaran Belanja 	Hasil dari penelitian ini kinerja anggaran belanjanya menunjukkan kinerja yang baik. Ditinjau dari segi efisiensi belanja, Dinas Kebudayaan sudah melakukan efisiensi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat rasio efisiensi yang kurang dari 100%.
5	Indah Syamsuddin, Putri Nurjannah Muhammad, Abdul Karim (2022)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja - Anggaran Belanja 	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan hasil bervariasi yang tiap tahunnya berbeda namun masih dikatakan baik

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
 Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 01 Desember 2022

K e p a d a
Yth. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/148A -II/BKBP/XII/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : **12811/S.01/PTSP/2022** Tanggal 01 Desember 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **FIDYAWATI DJAPRI**
 NIM / Jurusan : **A031191029 / Akuntansi**
 Pekerjaan : **Mahasiswa (S1) / UNHAS**
 Tanggal pelaksanaan: **01 Desember 2022 s/d 01 Januari 2023**
 Jenis Penelitian : **Skripsi**
 Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar**
 Judul : **"ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2021"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpoldmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
 KEPALA BADAN KESBANGPOL.
 u.b.
 SEKRETARIS,


DR. HARI S.IP., S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom
 Pangkat : **Pembina Tingkat I/IV.b**
 NIP : **19730607 199311 1 001**

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis UNHAS Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Telp. (0411) 3633700-3615450, Fax. (0411) 3633700
MAKASSAR 90111

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: 070/0075/BPKAD/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MUH. DAKHLAN, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Menerangkan bahwa Mahasiswa/i Perguruan Tinggi yang bernama:

Nama : **FIDYAWATI DJAPRI**
NIM : **A031191029**
Jurusan : **Akuntansi**
Perguruan Tinggi : **Universitas Hasanuddin**
Tanggal Pelaksanaan : **01 Desember 2022 s/d 01 Januari 2023**

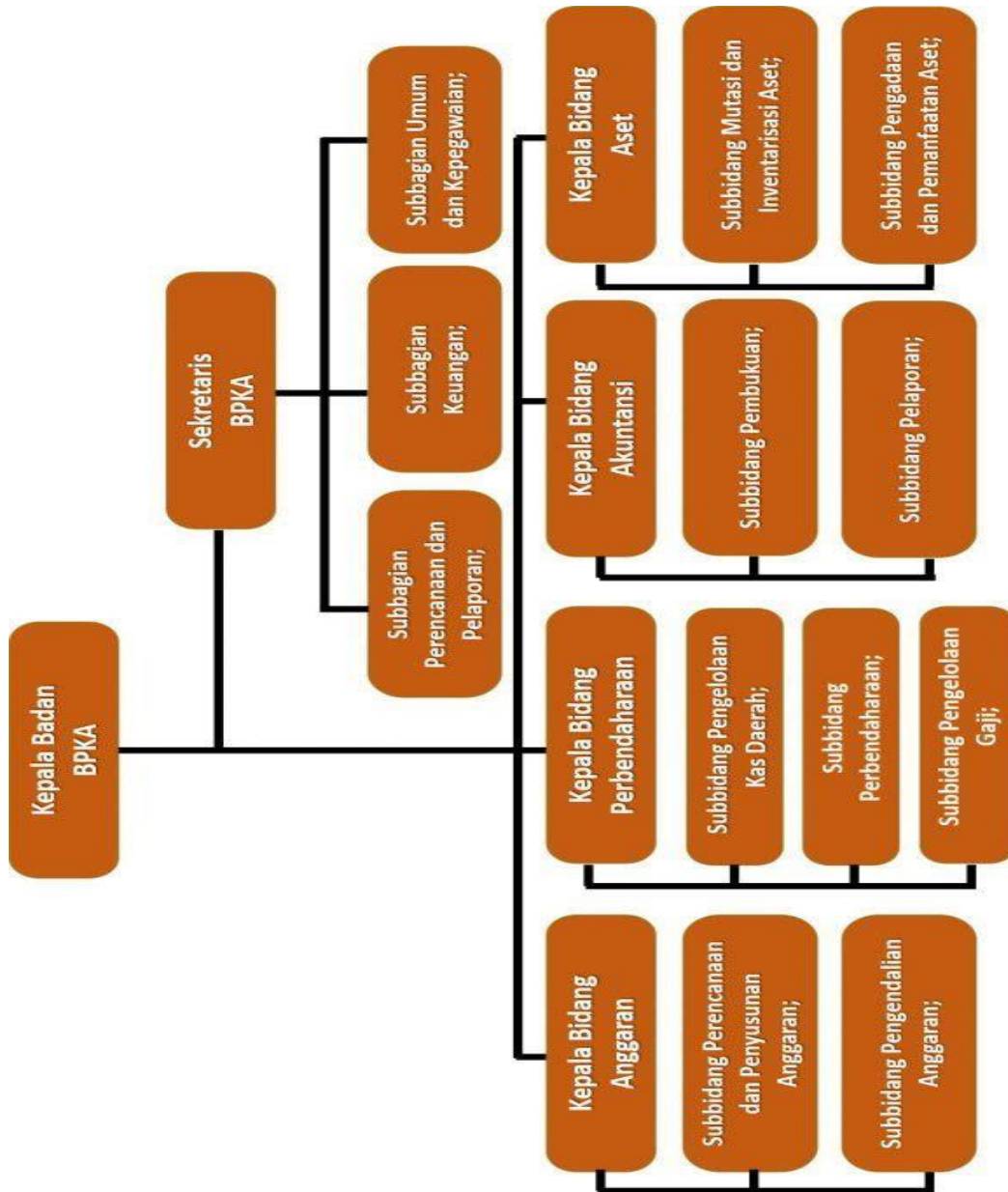
Benar telah melakukan penelitian / pengumpulan data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis dengan judul : **"ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2021"**.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Januari 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar


Drs. MUH. DAKHLAN, M.Si.
Rangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199311 1 005

Lamiran 5. Struktur Organisasi



Lampiran 6. Laporan Keuangan

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.892.235.958.000,00	3.428.479.729.162,65	463.756.228.837,35	88,09
4.1	Pendapatan asli daerah	1.503.411.219.000,00	1.185.453.010.989,85	317.958.208.010,35	78,85
4.1.1	Pajak daerah	1.155.991.478.000,00	942.551.891.961,00	213.439.586.039,00	81,54
4.1.2	Retribusi daerah	136.430.940.000,00	57.277.225.805,00	79.153.714.195,00	41,98
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	50.002.154.000,00	49.483.120.625,29	539.033.374,71	98,92
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	160.986.647.000,00	136.160.772.598,36	24.825.874.401,64	84,58
4.2	Dana perimbangan	1.878.090.139.000,00	1.808.260.589.494,00	69.829.549.506,00	96,28
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	146.515.496.000,00	107.280.350.505,00	39.235.145.495,00	73,22
4.2.2	Dana alokasi umum	1.300.764.306.000,00	1.299.534.321.692,00	1.209.984.308,00	99,91
4.2.3	Dana alokasi khusus	430.810.337.000,00	401.425.917.297,00	29.384.419.703,00	93,18
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	510.734.600.000,00	434.766.128.679,00	75.968.471.321,00	85,13
4.3.1	Hibah	132.904.600.000,00	128.588.743.987,00	4.315.856.013,00	96,75
4.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	324.416.000.000,00	272.000.033.019,00	52.415.966.981,00	83,84
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.750.000.000,00	17.875.000.000,00	17.875.000.000,00	50,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	17.864.000.000,00	16.302.351.673,00	1.361.648.327,00	92,29
4	Jumlah Pendapatan	3.892.235.958.000,00	3.428.479.729.162,65	463.756.228.837,35	88,09
5	BELANJA DAERAH	4.089.589.897.000,00	3.526.081.002.897,09	563.508.894.102,91	86,22
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.215.905.879.725,00	1.125.877.416.827,00	90.028.462.898,00	92,60
5.1.1	Belanja pegawai	1.060.550.341.725,00	984.940.957.967,00	75.609.383.758,00	92,87
5.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-
5.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.4	Belanja hibah	148.751.000.000,00	137.256.266.580,00	11.494.733.420,00	92,27
5.1.5	Belanja bantuan sosial	510.000.000,00	465.000.000,00	45.000.000,00	91,18
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	3.094.538.000,00	3.094.538.000,00	-	100,00
5.1.8	Belanja tidak terduga	3.000.000.000,00	120.654.280,00	2.879.345.720,00	4,02
5.2	Belanja Langsung	2.873.684.017.275,00	2.400.203.586.070,09	473.480.431.204,91	83,52
5.2.1	Belanja pegawai	245.790.168.957,00	223.251.786.100,00	22.538.382.857,00	90,83
5.2.2	Belanja barang dan jasa	1.674.786.356.787,00	1.430.119.739.515,00	244.666.617.252,00	85,39
5.2.3	Belanja modal	953.107.491.351,00	746.832.060.455,09	206.275.431.095,91	78,36
5	Jumlah Belanja	4.089.589.897.000,00	3.526.081.002.897,09	563.508.894.102,91	86,22
	Surplus/(Defisit)	(197.353.939.000,00)	(97.601.273.734,44)	(99.752.665.265,56)	49,45
	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan pembiayaan	272.353.939.000,00	272.358.289.419,35	(4.359.419,35)	100,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	272.353.939.000,00	272.353.939.419,35	(419,35)	100,00
6.1.2	Pencadangan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertamba/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.6	Penertmaan piutang daerah	-	-	-	-
6.1.7	Penertmaan Kembali Pinjaman Modal/Dana Bergulir	-	4.350.000,00	(4.350.000,00)	(100,00)
6.1	Jumlah penertmaan pembiayaan	272.353.939.000,00	272.358.289.419,35	(4.350.419,35)	100,00
6.2	Pengeluaran pembiayaan	75.000.000.000,00	-	75.000.000.000,00	0,00
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	75.000.000.000,00	-	75.000.000.000,00	0,00
6.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
6.2.4	Pembelian pinjaman daerah	-	-	-	-
6.2	Jumlah pengeluaran pembiayaan	75.000.000.000,00	-	75.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan neto	197.353.939.000,00	272.358.289.419,35	(75.004.350.419,35)	138,00
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	-	174.757.015.684,91	(174.757.015.684,91)	(100,00)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertamba/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.055.576.463.716,00	3.666.339.990.134,91	389.216.473.561,09	90,40
4.1	Pendapatan asli daerah	1.624.776.235.586,00	1.303.316.337.533,94	321.459.898.032,06	80,22
4.1.1	Pajak daerah	1.315.000.000.000,00	1.067.323.035.833,80	247.676.964.166,20	81,17
4.1.2	Retribusi daerah	132.348.780.000,00	68.097.361.544,56	64.251.418.455,44	51,45
4.1.3	Hasil pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan	37.809.786.683,00	18.225.557.950,00	19.584.228.734,00	48,20
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	139.617.668.903,00	149.670.382.216,58	(10.052.713.313,58)	107,20
4.2	Dana pertimbangan	1.905.309.925.464,00	1.824.567.795.440,00	80.742.130.016,00	95,76
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	111.573.264.000,00	77.673.025.393,00	33.900.238.607,00	69,62
4.2.2	Dana alokasi umum	1.406.148.187.000,00	1.379.148.200.000,00	26.999.987.000,00	98,08
4.2.3	Dana alokasi khusus	387.588.474.464,00	367.746.570.055,00	19.841.904.409,00	94,88
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	525.490.302.666,00	538.475.857.152,97	(12.985.554.486,97)	102,47
4.3.1	Hibah	138.825.600.000,00	132.401.628.152,00	6.423.971.848,00	95,37
4.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	337.584.703.666,00	356.994.230.000,97	(19.409.526.334,97)	105,75
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otomatis Khusus	31.415.999.000,00	31.415.999.000,00	-	100,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	17.664.000.000,00	17.664.000.000,00	-	100,00
4	Jumlah Pendapatan	4.055.576.463.716,00	3.666.339.990.134,91	389.216.473.561,09	90,40
5	BELANJA DAERAH	4.177.333.479.400,91	3.549.123.220.749,30	628.210.258.651,61	84,96
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.206.172.875.400,91	1.076.266.292.943,00	129.906.582.457,91	89,23
5.1.1	Belanja pegawai	1.106.358.144.940,00	1.016.603.100.943,00	89.665.044.006,00	91,90
5.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-
5.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.4	Belanja hibah	63.671.973.545,00	55.552.460.000,00	8.119.513.545,00	87,25
5.1.5	Belanja bantuan sosial	3.115.000.000,00	2.870.000.000,00	245.000.000,00	92,13
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.149.948.000,00	1.116.584.000,00	33.364.000,00	97,10
5.1.8	Belanja tidak langsung	31.877.808.906,91	34.148.000,00	31.843.660.906,91	0,11
5.2	Belanja Langsung	2.971.160.604.000,00	2.472.856.927.806,30	498.303.676.193,70	83,23
5.2.1	Belanja pegawai	219.569.606.583,00	195.613.821.282,00	23.955.785.301,00	89,09
5.2.2	Belanja barang dan jasa	1.632.090.986.253,00	1.303.040.321.841,50	239.050.664.411,50	85,35
5.2.3	Belanja modal	1.119.500.011.164,00	894.202.784.682,80	225.297.226.481,20	79,98
5	Jumlah Belanja	4.177.333.479.400,91	3.549.123.220.749,30	628.210.258.651,61	84,96
	Surplus/(Defisit)	(121.757.015.684,91)	117.236.769.405,61	(238.993.785.090,52)	96,29
	PEMBAYAAAN DAERAH	-	-	-	-
6.1	Penerimaan pembiayaan	174.757.015.684,91	174.757.265.684,91	(250.000,00)	100,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	174.757.015.684,91	174.757.015.684,91	-	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertamba/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.7	Penerimaan Kembali Pinjaman Modal/Dana Bergulir	-	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
6.1	Jumlah penerimaan pembiayaan	174.757.015.684,91	174.757.265.684,91	(250.000,00)	100,00
6.2	Pengeluaran pembiayaan	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	-	100,00
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Perputaran modal (investasi) daerah	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	-	100,00
6.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
6.2	Jumlah pengeluaran pembiayaan	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	-	100,00
	Pembayaran neto	121.757.015.684,91	121.757.265.684,91	(250.000,00)	100,00
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	238.994.035.090,52	(238.994.035.090,52)	(100,00)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urat	URAIAN	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.469.163.140.000,00	3.323.662.286.692,28	145.506.853.477,72	95,81
4.1	Pendapatan asli daerah	1.144.166.180.881,00	1.078.328.561.269,15	65.837.619.611,85	94,25
4.1.1	Pajak daerah	846.099.298.871,00	864.313.239.515,14	(17.813.940.644,14)	102,08
4.1.2	Retribusi daerah	76.551.490.762,00	87.204.193.741,00	9.347.297.021,00	87,79
4.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	62.009.352.589,00	31.875.688.803,83	30.133.663.785,17	51,40
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	158.906.038.659,00	114.935.439.209,00	43.970.599.449,92	72,33
4.2	Dana perimbangan	1.712.913.222.000,00	1.676.121.523.287,00	36.791.698.713,00	97,85
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/lagi hasil bukan pajak	107.510.210.000,00	116.705.692.342,00	(11.275.482.342,00)	110,49
4.2.2	Dana alokasi umum	1.286.419.315.000,00	1.249.647.261.000,00	36.771.924.000,00	97,14
4.2.3	Dana alokasi khusus	318.983.697.000,00	307.698.439.945,00	11.285.257.055,00	96,46
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	612.683.737.199,00	569.212.262.046,13	42.871.535.152,87	93,00
4.3.1	Hibah	185.288.087.199,00	185.818.274.714,00	19.469.812.485,00	89,49
4.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	324.398.602.000,00	302.750.607.332,13	21.635.994.667,87	93,33
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Operasi Khusus	74.623.320.000,00	74.623.320.000,00	-	100,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	27.781.728.000,00	26.020.000.000,00	1.761.728.000,00	93,65
4	Jumlah Pendapatan	3.469.163.140.000,00	3.323.662.286.692,28	145.506.853.477,72	95,81
5	BELANJA DAERAH	3.708.157.175.170,52	2.969.786.063.772,68	738.371.171.397,84	80,09
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.696.447.661.901,61	1.448.144.324.626,00	158.303.337.281,61	90,15
5.1.1	Belanja pegawai	1.243.978.129.832,00	1.176.839.033.927,00	67.139.096.005,00	94,60
5.1.2	Belanja barang	-	-	-	-
5.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.4	Belanja hibah	224.244.500.199,00	185.765.766.000,00	38.477.734.199,00	82,84
5.1.5	Belanja bantuan sosial	1.495.000.000,00	1.290.000.000,00	235.000.000,00	84,28
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.215.892.000,00	1.169.896.000,00	45.996.000,00	96,22
5.1.8	Belanja tidak langsung	135.514.139.770,61	83.108.628.693,00	52.405.511.077,61	61,33
5.2	Belanja Langsung	2.101.709.513.268,91	1.521.641.679.152,68	580.067.834.116,23	72,40
5.2.1	Belanja pegawai	49.985.372.800,00	41.541.803.375,00	8.453.569.425,00	83,09
5.2.2	Belanja barang dan jasa	1.449.723.717.301,00	1.188.897.135.242,61	260.826.582.058,19	82,01
5.2.3	Belanja modal	601.999.423.167,91	291.202.740.534,87	310.796.682.633,04	48,37
5	Jumlah Belanja	3.708.157.175.170,52	2.969.786.063.772,68	738.371.171.397,84	80,09
	Surplus/(Defisit)	(238.994.035.090,52)	353.876.282.829,60	(592.870.317.929,12)	148,07
	PEMBAYARAN DAERAH	-	-	-	-
6.1	Pemeriksaan pembiayaan	238.994.035.090,52	238.951.968.218,19	(57.953.127,67)	100,02
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SELPA)	238.994.035.090,52	238.951.968.218,19	(57.953.127,67)	100,02
6.1.2	Pencaduan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Pemeriksaan pinjaman daerah	-	-	-	-
6.1.5	Pemeriksaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
6.1.6	Pemeriksaan piutang daerah	-	-	-	-

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.7	Penyetoran Kembali Pinjaman Modal/Dana Bergilir	-	-	-	-
6.1	Jumlah penyetoran pembiayaan	238.994.035.090,52	238.051.988.218,19	(57.953.127,67)	100,02
6.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-
6.2.1	Pemberian dana cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyetoran modal (Investasi) daerah	-	-	-	-
6.2.3	Pembayaran politik ulang	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
6.2	Jumlah pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-
	Pembayaran neto	238.994.035.090,52	238.051.988.218,19	(57.953.127,67)	100,02
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SELFA)	-	592.928.271.047,79	(592.928.271.047,79)	(100,00)

LAMPIRAN 1 : Peraturan Daerah
 Nomor :
 Tanggal :

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD BERDASARKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.577.236.761.303,82	3.286.048.497.393,93	291.188.263.909,89	91,86
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.326.375.011.303,82	1.140.328.483.697,93	186.046.527.605,89	85,97
4.1.01	Pajak Daerah	1.000.025.000.000,00	924.347.962.910,12	75.677.037.089,88	92,43
4.1.02	Retribusi Daerah	91.794.490.000,00	54.184.449.344,56	37.610.040.655,44	59,03
4.1.03	Hasil Pengolahan Keluyutan Daerah yang Dipisahkan	82.746.454.000,00	22.251.094.159,45	60.495.360.840,55	26,89
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	151.808.867.303,82	139.544.967.283,80	12.263.880.020,02	91,92
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.079.261.278.000,00	1.986.482.874.976,00	92.778.403.024,00	95,54
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.722.655.278.000,00	1.717.636.163.041,00	4.799.114.959,00	99,72
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	356.606.000.000,00	268.826.711.935,00	87.779.288.065,00	75,33
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	171.800.472.000,00	159.237.138.720,00	12.563.333.280,00	92,8
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	171.800.472.000,00	159.237.138.720,00	12.563.333.280,00	92,8
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	3.577.236.761.303,82	3.286.048.497.393,93	291.188.263.909,89	91,86
5	BELANJA DAERAH	4.165.165.032.351,61	3.150.496.728.994,07	1.014.668.303.357,54	75,64
5.1	BELANJA OPERASI	3.246.389.826.405,49	2.665.273.234.471,50	581.096.591.933,99	82,1
5.1.01	Belanja Pegawai	1.331.940.717.356,83	1.208.914.475.888,00	123.026.241.468,83	90,76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.761.124.783.971,56	1.352.754.719.951,50	408.370.064.020,06	76,81
5.1.05	Belanja Hibah	152.524.325.077,00	103.207.048.632,00	49.317.276.445,00	67,67
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	770.000.000,00	396.990.000,00	373.010.000,00	51,56
5.2	BELANJA MODAL	668.274.936.260,00	322.972.030.025,57	345.302.906.234,43	48,33
5.2.01	Belanja Modal Tanah	21.307.760.000,00	6.598.942.100,00	14.708.817.900,00	30,97
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.885.417.299,00	110.252.404.448,00	51.633.012.851,00	68,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.978.197.816,00	34.540.693.805,57	89.437.504.012,43	27,86
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Inggal	329.697.044.926,00	149.470.608.679,00	180.226.436.247,00	45,34
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.406.516.217,00	22.109.380.993,00	9.297.135.224,00	70,4
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	250.530.269.686,12	162.251.464.497,00	88.278.805.189,12	64,76
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	250.530.269.686,12	162.251.464.497,00	88.278.805.189,12	64,76
	Jumlah BELANJA DAERAH	4.165.165.032.351,61	3.150.496.728.994,07	1.014.668.303.357,54	75,64
	Surplus / Defisit	(587.928.271.047,79)	135.551.768.399,86	(723.480.039.447,65)	(23,06)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	587.928.271.047,79	587.213.054.243,79	715.216.804,00	99,88
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	587.928.271.047,79	587.213.054.243,79	715.216.804,00	99,88
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	587.928.271.047,79	587.213.054.243,79	715.216.804,00	99,88

Kode	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100
	Jumlah PEMBIAYAAN DAERAH	587.928.271.047,79	587.213.054.243,79	715.216.804,00	99,88
	Sisa Kurang / Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	722.764.822.643,65	(722.764.822.643,65)	100